

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PROGRAM CSR TEMATIK DI KABUPATEN MUARA ENIM

Hevan Walizi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

*Corresponding email: hevanw@gmail.com

Abstrak: Kebijakan pelaksanaan pendanaan pembangunan daerah melalui csr tematik di kabupaten muara enim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan pembangunan yang berorientasi pada kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengarahkan program CSR tematik sebagai sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah, bentuk sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR tematik di Kabupaten Muara Enim dan untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam pelaksanaan program CSR tematik sebagai pendukung pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim. Metode dalam penelitian ini adalah stud literature. Hasil dalam penelitian ini adalah Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, program CSR tematik dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata kunci: pendanaan pembangunan, CSR, Muara enim.

Abstract: *The policy of implementing regional development funding through thematic CSR in Muara Enim Regency demonstrates innovation in development management that is oriented toward collaboration, efficiency, and sustainability. The aim of this study is to explore the Muara Enim Regency government's policy in directing thematic CSR programs as an alternative source of regional development funding, to identify the forms of synergy between local government, companies, and the community in implementing thematic CSR programs in Muara Enim, and to understand the challenges and solutions in implementing thematic CSR programs as a support for regional development in Muara Enim Regency. The findings of this study indicate that with strong synergy between the government, companies, and the community, along with a commitment to continuous improvement, thematic CSR programs can serve as a strategic instrument to accelerate regional development in Muara Enim in an inclusive, participatory, and welfare-oriented manner.*

Keywords: *development funding, CSR, Muara Enim.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Muara Enim memaksimalkan potensi sumber pendanaan alternatif melalui kebijakan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat tematik (Berliansyah Putra et al., 2022). CSR tematik merupakan pendekatan strategis di mana program tanggung jawab sosial perusahaan diarahkan secara terstruktur dan selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik dari sisi sektor prioritas maupun wilayah sasaran. Kebijakan ini tidak hanya mengedepankan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap dana CSR memiliki dampak nyata terhadap pemecahan isu-isu pembangunan yang spesifik dan mendesak di Muara Enim, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar (Haryati et al., 2020).

Kabupaten Muara Enim sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan dan energi, memiliki potensi besar dalam menggandeng dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut (Pambudi & Pramuj, 2022) pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk merancang kebijakan CSR tematik yang berbasis pada kolaborasi multipihak antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program CSR ini tidak lagi bersifat karitatif atau insidental, melainkan

diarahkan pada kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting sebagai koordinator dalam merumuskan tematik CSR, menyusun peta jalan program, dan memfasilitasi sinergi lintas sektor agar kegiatan CSR berjalan optimal (Sudirman, Faturachman Alputra., 2020).

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR tematik. Untuk itu, dibentuklah Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Forum ini berfungsi sebagai platform dialog untuk menyusun agenda CSR secara partisipatif, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program (Pambudi et al., 2022). Dengan adanya forum ini, perusahaan tidak lagi menjalankan program CSR secara terpisah atau berdasarkan agenda internal, melainkan didorong untuk menyelaraskan kegiatan sosialnya dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan lokal. Hal ini menciptakan nilai tambah bagi semua pihak: perusahaan dapat meningkatkan citra dan hubungan sosialnya dengan masyarakat, pemerintah terbantu dalam pendanaan pembangunan, dan masyarakat menerima manfaat yang lebih tepat sasaran (Setyo Pambudi, 2021).

Kebijakan CSR tematik di Muara Enim juga berupaya menumbuhkan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sebagai contoh, program CSR yang sebelumnya hanya fokus pada bantuan sembako kini berkembang menjadi program peningkatan keterampilan (*capacity building*), penyediaan sarana air bersih, pembangunan sekolah dan posyandu, hingga dukungan terhadap UMKM lokal (Pratiwi et al., 2023). Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar bantuan menjadi investasi sosial yang berkelanjutan. CSR tidak lagi dipandang sebagai kewajiban moral semata, melainkan sebagai bagian dari kontribusi nyata dunia usaha dalam pencapaian target pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Pelaksanaan kebijakan ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman di antara pelaku usaha mengenai konsep CSR tematik dan peran strategis mereka dalam pembangunan. Sebagian perusahaan masih melihat CSR sebagai beban biaya atau sekadar aktivitas pelengkap, bukan bagian dari strategi bisnis yang terintegrasi (Amelia et al., 2022). Edukasi dan advokasi kebijakan perlu terus dilakukan, termasuk melalui regulasi yang jelas dan insentif bagi perusahaan yang aktif mendukung program CSR tematik. Tantangan lainnya adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk menentukan sasaran program CSR. Untuk itu, sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah sangat penting dalam menyuplai data kebutuhan masyarakat secara tepat.

Keberhasilan implementasi kebijakan CSR tematik juga sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjadi fasilitator yang netral, profesional, dan proaktif dalam menjaga integritas program. Dalam konteks ini, penguatan sistem pelaporan dan pelacakan program menjadi langkah krusial, sehingga keberhasilan dan kegagalan setiap program CSR dapat dianalisis secara sistematis dan menjadi pembelajaran bersama. Tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, agar program CSR benar-benar memberikan dampak langsung, sesuai harapan, dan memberdayakan komunitas lokal secara berkelanjutan (Yuliawati, 2020).

Pencemaran air dan tanah akibat perilaku buang air besar sembarangan (BABS) menjadi isu serius yang mengancam kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki sistem sanitasi memadai. Akar permasalahan ini bermula dari kebiasaan masyarakat yang masih membuang air besar di tempat terbuka karena tidak memiliki akses

terhadap jamban sehat, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Kondisi ini diperburuk dengan belum optimalnya penanganan sanitasi oleh pihak terkait, yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak. Pada level yang lebih dalam, masalah ini juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta minimnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman. Selain itu, kurangnya sinergi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi daerah turut memperparah kondisi ini.

Perilaku buang air besar sembarangan masih terus terjadi dan menyebabkan pencemaran air serta tanah yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pernyataan masalah yang perlu disoroti secara khusus adalah pencemaran air dan tanah akibat perilaku BABS, yang dipicu oleh belum optimalnya penanganan sanitasi secara menyeluruh oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Masalah ini menuntut intervensi lintas sektor dan pendekatan partisipatif agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

METODE

Studi penelitian dengan pendekatan studi literatur mengenai Kebijakan Pelaksanaan Pendanaan Pembangunan Daerah Melalui Program CSR Tematik di Kabupaten Muara Enim bertujuan untuk menggali berbagai perspektif dan temuan empiris dari penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR) tematik dijadikan sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi seperti Kabupaten Muara Enim.

Melalui studi literatur, peneliti menganalisis kebijakan daerah, regulasi CSR nasional, serta bentuk-bentuk sinergi yang telah dibangun antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, seperti lemahnya koordinasi antar pihak dan kurangnya mekanisme evaluasi, sekaligus menelaah solusi yang telah diterapkan di daerah lain sebagai pembandingan. Dengan mengkaji literatur yang komprehensif, studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait efektivitas kebijakan CSR tematik dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah mewujudkan 100 persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF). Hingga September 2024, capaian akses pengguna jamban di kabupaten ini dilaporkan telah mencapai 97,71 persen. Pemerintah menargetkan pencapaian 100 persen SBS pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, ribuan jamban sehat telah dibangun di seluruh wilayah Muara Enim. Pembangunan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui dana APBD, serta kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Muara Enim.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi salah satu program unggulan yang dijalankan. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat melalui pemberdayaan. Selain itu, Kabupaten Muara Enim juga memiliki program inovatif bernama "Amnesti Tangki Septik Bocor" (ATSB). Program ini didasarkan pada prinsip "yang mencemar harus membayar, yang sesuai aturan diberi insentif" dan

bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak, khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja, serta mengurangi perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Sebelum adanya inovasi ini, tercatat masih banyak masyarakat yang memiliki tangki septik tidak aman dan tidak pernah dikuras, serta praktik BABS yang masih terjadi.

Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan dalam sektor sanitasi di Muara Enim masih ada. Beberapa di antaranya adalah potensi pencemaran air dan tanah akibat tangki septik yang tidak dikelola dengan baik, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Penyakit berbasis air seperti diare menjadi salah satu dampak dari kondisi sanitasi yang belum optimal. Upaya peningkatan sanitasi ini juga sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk kualitas air.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga telah mengeluarkan landasan hukum berupa Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program sanitasi di daerahnya. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang dilakukan PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dalam pembangunan jamban sehat dengan memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA), turut memperkuat upaya pencapaian target sanitasi di Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Kolaboratif Melalui CSR Tematik Tahun 2023 dan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 CSR Tematik Tahun 2023

| No | PERANGKAT DAERAH | PAGU (Rp) | JUMLAH KEGIATAN |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 128.399.000 | 1 Kegiatan |
| 2 | Dinas Kesehatan | 3.697.500.000 | 539 Unit |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.456.000.000 | 438 Unit |
| 4 | Dunia Usaha* | 350.000.000 | 50 Unit |
| 5 | APBDes* | 386.890.000 | 48 Unit |
| 6 | BAZNAZ | 35.000.000 | 5 Unit |
| TOTAL | | 11.018.789.000 | 1.080 Unit |

Tabel 2 CSR Tematik Tahun 2024

| No | Nama Perusahaan | Jumlah Unit |
|-------|------------------------------|-------------|
| 1 | PT. Bumi Sawindo Permai | 10 Unit |
| 2 | PT. Bara Anugrah Sejahtera | 3 Unit |
| 3 | PT. Satria Bahana Sarana | 5 Unit |
| 4 | PT. TEL Pulp and Paper | 80 Unit |
| 5 | PT. Putra Perkasa Abadi | 5 Unit |
| 6 | PT. Huadian Bukit Asam Power | 6 Unit |
| Total | | 109 Unit |

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengimplementasikan kebijakan strategis dalam mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) tematik sebagai sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan

peran serta sektor swasta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi keterbatasan anggaran yang tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (S.Tulis, 2021). Salah satu landasan kebijakan tersebut tercermin dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Peraturan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat tematik, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Priliantini et al., 2019). Melalui pendekatan ini, diharapkan program CSR tidak hanya bersifat sporadis, tetapi terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Kebijakan ini juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah melalui program CSR tematik yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal. Pemerintah daerah menyediakan platform komunikasi dan koordinasi yang efektif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan daerah. Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) tematik di Kabupaten Muara Enim menjadi sebuah wujud kolaborasi strategis yang melibatkan tiga pilar utama, yakni pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat (Handayani & Hidayati, 2022).

Sinergi antar ketiga pihak ini menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa program CSR tidak hanya berjalan secara formalitas, tetapi memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah melalui kebijakan dan regulasi yang dibuat, bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan sumber daya perusahaan. Menurut (Saleh & Sihite, 2020) perusahaan berperan sebagai pelaksana utama program CSR yang tidak hanya berbentuk donasi finansial, tetapi juga kontribusi non-finansial seperti transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus mitra aktif dalam program CSR turut memberikan masukan, memonitor pelaksanaan, dan memelihara hasil yang diperoleh agar program berjalan sesuai harapan.

Sinergi pertama terlihat dari peran pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang jelas dan terarah terkait CSR tematik. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengintegrasikan program CSR ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini penting agar program CSR dapat difokuskan pada isu-isu prioritas pembangunan, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Aji & Utami, 2022). Pemerintah juga membentuk forum atau wadah komunikasi, seperti Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang berfungsi sebagai media koordinasi antara perusahaan, masyarakat, dan aparat pemerintah. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan riil masyarakat serta memantau pelaksanaan dan evaluasi program secara berkala. Melalui forum ini, pemerintah berperan mengawasi akuntabilitas penggunaan dana CSR dan menghindari tumpang tindih program sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal (Maulud & Sriwulan Ferindian Falatehan, 2022).

Perusahaan, sebagai pihak yang menjalankan program CSR, semakin diarahkan untuk mengimplementasikan program dengan pendekatan tematik dan terukur sesuai arahan pemerintah. Dalam konteks Muara Enim, perusahaan khususnya yang bergerak di sektor

pertambahan dan energi yang memiliki kewajiban CSR tidak hanya menyalurkan bantuan finansial, tetapi juga melakukan pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Contohnya, program pelatihan keterampilan kerja, pendirian unit usaha kecil menengah (UKM), dan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan pos kesehatan (Purwaningsih, 2024). Pendekatan ini memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar bantuan sementara. Selain itu, perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lokal dalam pelaksanaan program CSR agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Perusahaan mampu membangun reputasi sosial yang positif sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi wilayah operasi mereka.

Masyarakat Kabupaten Muara Enim memiliki peran strategis sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan program CSR. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak keberlanjutan program. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan melalui musyawarah desa atau forum konsultasi publik memastikan bahwa program CSR benar-benar menyentuh kebutuhan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan monitoring program membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian program dengan kondisi lokal (Br Sitepu & Maulana, 2021). Dalam beberapa kasus, masyarakat juga diberdayakan untuk mengelola hasil program, seperti pengelolaan unit usaha bersama atau pemeliharaan fasilitas yang dibangun melalui CSR. Pendekatan partisipatif ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program, sehingga hasilnya dapat bertahan lama.

Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk kolaborasi program lintas sektor. Misalnya, pemerintah daerah bersama perusahaan dapat merancang program CSR yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Kemudian, masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dengan menjadi tenaga kerja terampil atau pelaku usaha mikro (Syukerti et al., 2022). Kolaborasi seperti ini menunjukkan bagaimana CSR dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah memfasilitasi regulasi dan pengawasan, perusahaan menyumbang sumber daya dan teknologi, serta masyarakat berperan aktif dalam pemanfaatan hasil program.

Dukungan teknologi informasi juga memperkuat sinergi ini dengan mempermudah komunikasi dan pelaporan antara pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan data kebutuhan masyarakat dan memantau pelaksanaan program CSR. Perusahaan dapat melaporkan kegiatan secara transparan dan real-time, sementara masyarakat dapat memberikan umpan balik secara langsung melalui aplikasi atau media sosial. Hal ini meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas program CSR, serta meminimalisasi kendala komunikasi yang selama ini sering menjadi hambatan (Rahmayani & Silvana, 2018).

Pelaksanaan sinergi ini tidak luput dari berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan pemerintah terkait prioritas program, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola program, serta kendala birokrasi yang kadang menghambat percepatan pelaksanaan (Putra, 2023). Diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun kapasitas ketiga pilar ini, termasuk pelatihan bagi aparat pemerintah dan masyarakat, peningkatan pemahaman perusahaan tentang CSR yang strategis, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Dengan memperkuat sinergi dan mengatasi hambatan tersebut,

program CSR tematik di Kabupaten Muara Enim dapat menjadi model sukses yang efektif mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Bentuk sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR tematik di Kabupaten Muara Enim menampilkan sebuah mekanisme kerja sama yang saling menguatkan. Ketiga pihak berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga sumber daya CSR dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan lokal (Iryadana, 2024). Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban APBD, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, Kabupaten Muara Enim dapat mengoptimalkan potensi CSR sebagai salah satu pilar utama dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) tematik sebagai pendukung pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi secara menyeluruh agar dapat dirumuskan solusi yang efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat (Yuliatwati, 2020). Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan dan regulasi mengenai CSR tematik, implementasinya sering terhambat oleh komunikasi yang kurang intens dan kurangnya integrasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Akibatnya, program CSR yang dijalankan perusahaan terkadang tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat atau bahkan tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya, sehingga efektivitas dan dampaknya menjadi kurang optimal (S.Tulis, 2021).

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan kapasitas dan pemahaman baik di pihak masyarakat maupun aparat pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program CSR. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat sering kali kurang memiliki kemampuan untuk mengelola bantuan atau program yang diberikan secara mandiri, sehingga keberlanjutan program menjadi rentan terhenti setelah dana CSR habis. Menurut (Priliantini et al., 2019) pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan juga terkendala oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang masih minim untuk memantau pelaksanaan program secara efektif. Kondisi ini menimbulkan risiko penyimpangan penggunaan dana CSR atau kurangnya transparansi dalam pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap program CSR.

Tantangan berikutnya berasal dari aspek budaya organisasi perusahaan dan motivasi pelaksanaan CSR itu sendiri. Beberapa perusahaan masih melihat CSR sebagai kewajiban hukum atau bentuk pengeluaran yang bersifat formalitas, bukan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR yang dijalankan cenderung bersifat sporadis dan tidak terencana secara tematik, sehingga dampak jangka panjangnya sulit untuk diukur (Handayani & Hidayati, 2022). Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya lokal yang sangat beragam, terutama di daerah dengan komunitas masyarakat adat atau dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Kurangnya pemahaman mendalam terhadap budaya lokal dapat menyebabkan program CSR kurang diterima atau bahkan menimbulkan konflik sosial.

Menanggapi tantangan tersebut, solusi strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah memperkuat mekanisme koordinasi dan integrasi program

CSR melalui pembentukan forum CSR yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat (Saleh & Sihite, 2020). Forum ini berfungsi sebagai wadah dialog, perencanaan bersama, dan evaluasi berkala untuk menyelaraskan program CSR dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Program CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan secara individu, tetapi bagian dari upaya kolektif dalam membangun daerah secara terarah dan efektif.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan manajemen program, pengawasan keuangan, serta penggunaan teknologi informasi bagi aparatnya dan masyarakat penerima manfaat CSR. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan juga mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan (Aji & Utami, 2022). Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring digital juga harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR. Penggunaan aplikasi digital atau platform online yang terintegrasi dapat membantu memantau pelaksanaan program secara real-time dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung.

Dalam menghadapi tantangan budaya dan motivasi perusahaan, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk memandang CSR sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan dengan memberikan insentif fiskal atau penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menjalankan program CSR dengan dampak positif dan inovatif. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya CSR strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan juga harus digalakkan (Maulud & Sriwulan Ferindian Falatehan, 2022). Perusahaan perlu didorong untuk melakukan studi dan pemetaan sosial budaya secara mendalam sebelum merancang program CSR agar lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan kemitraan yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dapat memperkuat kepercayaan dan dukungan terhadap program CSR.

Diversifikasi bentuk program CSR tematik juga perlu dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, tetapi dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur secara terpadu. Pendekatan tematik ini memungkinkan program CSR dapat berkontribusi secara holistik dalam pembangunan daerah dan mengatasi masalah yang saling terkait. Misalnya, program pelatihan keterampilan kerja dapat dikombinasikan dengan pemberian modal usaha kecil dan pembangunan fasilitas pendukung sehingga meningkatkan daya saing masyarakat secara menyeluruh (Purwaningsih, 2024). Agar solusi tersebut berjalan efektif, komitmen politik dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung regulasi dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan CSR tematik, serta menjamin kesinambungan program dalam jangka panjang. Evaluasi dan audit rutin juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa program CSR tidak hanya berjalan dengan baik secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata yang berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim (Br Sitepu & Maulana, 2021).

Meskipun tantangan dalam pelaksanaan program CSR tematik sebagai pendukung pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim cukup kompleks, melalui sinergi yang terstruktur antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat serta penerapan solusi yang tepat, program CSR dapat menjadi instrumen yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah (Syukerti et al., 2022). Upaya terus-menerus untuk memperbaiki koordinasi, meningkatkan kapasitas, memotivasi perusahaan, dan memahami dinamika sosial

budaya lokal akan mengoptimalkan manfaat CSR bagi kemajuan Kabupaten Muara Enim secara menyeluruh.

SIMPULAN

Pelaksanaan program CSR tematik di Kabupaten Muara Enim memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya kesadaran dan motivasi perusahaan dalam menjalankan CSR secara strategis. Selain itu, tantangan budaya lokal dan minimnya partisipasi aktif masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas program.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Pemerintah daerah harus memperkuat peran forum CSR sebagai wadah kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur, serta menerapkan sistem digital dalam monitoring dan evaluasi program. Di sisi perusahaan, pendekatan CSR perlu diarahkan pada strategi bisnis jangka panjang yang mengedepankan keberlanjutan, inovasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penting untuk memastikan bahwa setiap program CSR memiliki relevansi budaya dan konteks lokal agar mudah diterima dan berdampak nyata.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, program CSR tematik dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, T. P., & Utami, D. (2022). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pemberdayaan Disabilitas. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.55381/jpm.v1i3.40>
- Amelia, A., Suryanto, A., & Marlina, L. (2022). Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Program Corporate Social Responsibility Di Bprs Al-Madinah Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.4606>
- Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1). <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>
- Br Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Handayani, E., & Hidayati, N. (2022). Peranan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Inovasi Ukm Melalui Orientasi Kewirausahaan. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1). <https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.725>
- Haryati, S., Hanum, F., & Yanuarita, H. A. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Kecamatan Doko Kelurahan Blitar. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1198>
- Iryadana, M. R. (2024). Peran Strategis Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).

- <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.V4i1.154>
- Maulud, F., & Sriwulan Ferindian Falatehan. (2022). Hubungan Tingkat Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dengan Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 6(1). <https://doi.org/10.29244/jskpm.V6i1.957>
- Pambudi, A. S., Lady Manalu, G. S., & . D. (2022). Evaluasi Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah Pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu Dan Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.V5i2.2679>
- Pambudi, A. S., & Pramujito, B. (2022). Peran Dana Transfer Khusus Bagi Pembangunan Bidang Irigasi Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.V5i1.2250>
- Pratiwi, N. I., Suardana, G., Suyasa, I. M., & Bargandini, A. A. I. S. (2023). Program Corporate Social Responsibility Indonesianext Sebagai Strategi Brand Awareness Telkomsel Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Audience*, 5(2). <https://doi.org/10.33633/ja.V5i2.6470>
- Priyantini, A., Herlina, E., & Venus, A. (2019). Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (Csr) “Pln Peduli” (Studi Kasus Di Kantor Pusat Pt. Pln (Persero)). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(2). <https://doi.org/10.31504/komunika.V8i2.1995>
- Purwaningsih, D. D. P. (2024). Strategi Komunikasi Program Corporate Social Responsibility Pt Abc Restoran Apung Seba, Sidoarjo. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(5). <https://doi.org/10.55324/jgi.V1i5.45>
- Putra, G. P. (2023). Implementasi Program Corporate Social Responsibility Pt Gojek Indonesia Dalam Mencapai Sdgs. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.31602/jm.V6i1.10190>
- Rahmayani, R., & Silvana, H. (2018). Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. *Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/prh.V2i2.13115>
- S.Tulis, R. (2021). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/10.37304/jispar.V6i2.414>
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/interaksi.V4i1.4134>
- Setyo Pambudi, A. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Big Data Dalam Evaluasi On Going Dak Fisik Bidang Kesehatan Saat Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 4(2). <https://doi.org/10.47266/bwp.V4i2.96>
- Sudirman, Faturachman Alputra., D. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Neo Societal*, 5(4).
- Syukerti, N., Ningsih, I. N. D. K., & Evanne, L. (2022). Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt.Bara Prima Pratama Di Desa Batu Ampar Indragiri Hilir Riau. *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 9(1). <https://doi.org/10.31602/al-kalam.V9i1.5391>
- Yuliawati, E. (2020). Sosialisasi Pemanfaatan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal Of Community Engagement)*, 6(4). <https://doi.org/10.22146/jpkm.43681>